



**SUMBER BERITA**

<input checked="" type="checkbox"/>	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU	.....

**KATEGORI BERITA UNTUK BPK**

POSITIF     NETRAL     BAHAN PEMERIKSAAN     PERHATIAN KHUSUS

**Segera, 2 Kasus Diusut Kejati Diajukan Audit**



**AGNES TRIANI**

**BENGKULU** - Dua kasus dugaan korupsi yang ditangani Kejati Bengkulu telah naik penyidikan. Diantaranya, dugaan mark up belanja barang dari dana BOS Afirmasi non-fisik Rp 6,1 miliar di Kabupaten Seluma dan program replanting sawit tahun 2019-2020 di

Bengkulu Utara sebesar Rp 150 miliar.

Penyidik Pidsus Kejati Bengkulu masih mengumpulkan alat bukti berupa dokumen dan bahan keterangan dari sejumlah saksi. Dan dalam waktu dekat penyidik akan mengajukan untuk dilakukan audit kerugian negara. Pilihannya bisa ke BPK RI atau BPKP Perwakilan Bengkulu. "Sambil berjalan, audit itukan mengumpulkan bahan. Jika tidak ada data gimana melakukan audit, tetapi berproses mudah-mudahan segera dan pasti (dilakukan audit)," ujar Kajati Bengkulu, Agnes Triani, SH, MH.

Kajati meminta awak media tidak lagi mengejar-ngejar saksi yang dipanggil penyidik untuk menjalani pemeriksaan. Hal itu dikarenakan penyidik membutuhkan waktu dan ruang untuk melakukan pengusutan. Jika nantinya pemeriksaan sudah selesai, maka pihaknya akan menyerahkan bahan ke BPK RI atau BPKP Perwakilan Bengkulu untuk melakukan audit. Untuk itu, ia meminta agar semua pihak bisa bersabar karena jika tidak ada data bagaimana akan melakukan audit. "Pemeriksaan sedang berlanjut, jadi sabar, masih berproses, nanti kita sampaikan," tandasnya.

Ketika ditanya dari dua kasus tersebut manakah yang diprioritaskan, Kajati mengatakan keduanya tengah dalam proses penyidikan. "Lihat aja tergantung mana yang lebih cepat, tetapi pasti," tegasnya.

Diketahui, pada kasus replanting kebun kelapa sawit rakyat di Kabupaten Bengkulu Utara tahun 2019-2020, penyidik pidsus Kejati Bengkulu telah mendapati adanya bukti perbuatan melawan hukum. Yang mana adanya penyalahgunaan anggaran sebesar Rp 25 juta perhektare atau total Rp 150 miliar yang seharusnya digunakan untuk kegiatan replanting kebun kelapa sawit rakyat total seluas 6 ribu hektare. Faktanya, sebagian anggaran digunakan untuk pembelian dan penanaman lahan karet dan jeruk.

Sedangkan dugaan mark up belanja dana BOS Afirmasi non-fisik di Kabupaten Seluma tahun 2020 sebesar Rp 6,1 miliar juga telah ada indikasi perbuatan melawan hukum. Penyidik mendapati adanya penggelembungan harga, salah satunya pada pembelian 133 unit laptop oleh 102 sekolah di Biru Komputer. Harga perunit laptop merek Assus intelcore i51035G1 di pasaran Rp 8,5 juta perunit di luar pajak, oleh pihak sekolah dalam kuitansi pembelian tertera Rp Rp 13 juta per unit setelah ditambah pajak Rp 1,3 juta perunit. Dari penghitungan sementara penyidik Kejati Bengkulu, potensi kerugian negara bisa mencapai Rp 800 juta.(cup)